

Kelurahan Kemiri Boyolali sebagai Desa Wisata

Didik Nopianto A Nugradi, Wiwit Setyowati

Laboratorium Perancangan Kota dan Permukiman/Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik/Universitas Negeri Semarang.
Korespondensi : didiknop@gmail.com

Abstrak

Pembangunan daerah yang hanya berdasar satu aktor utama yaitu pemerintah, akan kurang berhasil bila dibandingkan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku sesuai peran dan kemampuannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Kemiri. Metoda pengumpulan data berdasarkan observasi kondisi lapangan, survey data sekunder dan wawancara ke masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan dari kegiatan ini adalah adanya potensi Kelurahan Kemiri sebagai Desa Wisata berdasarkan potensi yang dimiliki dan perlunya pemberdayaan masyarakat lokal untuk usaha pengembangan Desa Wisata tersebut.

Kata-kunci : desa wisata, kemiri, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Kelurahan Kemiri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Kelurahan Mojosongo menjadi lebih dikenal oleh masyarakat baik yang ada di Kabupaten Boyolali maupun dari luar, karena keberadaan pusat pemerintahan kabupaten yang sejak tahun 2015 berada di wilayah kelurahan ini. Selain itu di wilayah kelurahan ini juga sedang dibangun Kebun Raya Indrokilo oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Seperti pada umumnya kelurahan lain di Kecamatan Mojosongo, kelurahan ini memiliki sumber daya alam berupa : tanah pertanian lahan basah dan juga lahan kering berupa tanah tegalan dan permukiman. Sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi, dengan jenis pekerjaan dominan sebagai petani, dan sebagian kecil adalah pedangang, pekerja industri, maupun pekerja di bidang lain.

Perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kemiri saat ini tidak berbeda jauh dengan masyarakat di Kelurahan

lain di Kecamatan Mojosongo, hal ini dapat dilihat dari belum adanya peningkatan aktifitas, pembangunan fisik, dan peningkatan pendapatan yang signifikan dari masyarakat.

Mengingat potensi dan perkembangan yang ada, yaitu adanya pusat pemerintahan dan keberadaan Kebun Raya Indrokilo, sudah semestinya apabila masyarakat di Kelurahan Kemiri juga ikut berkembang dan lebih juga terlibat terutama untuk kegiatan pariwisata skala besar di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 10 tahun 2010 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa masyarakat setempat harus ikut diberdayakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Wiendu, 1993). Terdapat

Kelurahan Kemiri Boyolali sebagai Desa Wisata

dua konsep yang utama dalam komponen wisata yaitu :

- a) Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang dari rumah tinggal penduduk.
- b) Atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi serta desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa, dan lain-lain yang spesifik.

Dalam pengembangan desa wisata terdapat beberapa prinsip, antara lain :

- a) Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau di dekat dengan desa.
- b) Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, bekerja sama atau individu yang memiliki.
- c) Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau sifat atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Menurut Yoeti (1998), potensi wisata adalah suatu aset yang dimiliki daerah tujuan wisata atau aspek wisata yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tidak mengesampingkan aspek sosial budaya. Dengan demikian potensi wisata secara umum dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a) *Site attraction* (tempat), adalah suatu tempat yang dijadikan objek wisata seperti tempat-tempat tertentu yang menarik dan keadaan alam, *site attraction* terbagi menjadi 3 kategori yaitu:
 - *Site Culture* (budaya), seperti kehidupan sosial masyarakat, atau tempat-tempat bersejarah
 - *Man made* (buatan manusia), misalnya tempat dengan suasana yang menarik hasil dari buatan manusia

- *Site nature* (alam), seperti tempat-tempat tertentu yang menarik dan keadaan alam.

b) Event attraction terbagi dalam 3 kategori :

- Event culture (budaya), seperti pameran budaya, pameran, atau peristiwa-peristiwa budaya.
- Human made (buatan), seperti tari-tarian, musik dan hasil karya manusia lainnya.
- Site nature (alam), seperti kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan alam.

Community Based Tourism (CBT)

Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata (Nasikun, 1997). Untuk itu muncul konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat.

Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata. Pandangan ini serupa dengan Abe (2002) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendapat Abe ini diperkuat Adiyoso (2009). Untuk itu diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi peranannya yang lebih besar kepada masyarakat. Hal senada diungkap-

kapkan oleh Dewi dkk (2013), bahwa untuk kasus Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali, perlu untuk mengurangi peran dominan pemerintah dan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Menurut Susyanti (2013), dari hasil survey lapangan ke beberapa desa wisata dapat diketahui bahwa masyarakat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola desa wisata. Belajar dari kasus pengembangan desa wisata lain dapat menjadi alternatif dalam peningkatan ketrampilan masyarakat dalam pengembangan desanya sendiri.

Muslim (2016) memberikan rekomendasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan desa wisata yang dilakukan dalam dua tahap: pertama, menggali potensi, membangun mimpi, mengembangkan strategi, dan mengambil tindakan. Kedua, hal itu juga dilakukan dengan membangun kesadaran kewirausahaan di kalangan masyarakat, menyediakan fasilitas bisnis, dan melatih keterampilan bisnis. Upaya tersebut, pada kenyataannya, telah berhasil dan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, seperti yang ditunjukkan pada, antara lain, kesempatan kerja terbuka, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan investasi dari masyarakat setempat.

Metoda Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan merupakan metoda kualitatif deskriptif.

Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Metoda Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan pedoman teori dan konsep dari hasil kajian pustaka mengenai desawisata.

Hasil dan Pembahasan

Potensi Wisata Kelurahan Kemiri

Seperti telah disebutkan di atas, Kelurahan ke-

miri merupakan wilayah yang sudah mulai terkenal berkat keberadaan pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali dan Kebun Raya Indrokilo. Pada bagian barat di wilayah kelurahan ini telah dibangun dan berkembang kompleks perkantoran terpadu yang berisi kantor-kantor pemerintahan tingkat kabupaten, yaitu kantor DPRD, kantor bupati dan pendapa, Setda, Satpol PP, DPPKAD, Bappeda, BPMPT, Inspektorat, Disperindag, Bapermasdes, BKD, DLH, Disdukcapil, Dinsosnakertras, Dispartanbunhut, Dinas Kesehatan BP3AKB, Disnakan, BKP3, ULP dan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu kompleks perkantoran terpadu juga dilengkapi dengan Masjid Agung, Alun-alun dan fasilitas peribadatan dari berbagai agama. Yang menarik dari tampilan fisik kompleks perkantoran terpadu, selain dari adanya gedung-gedung kantor pemerintah dengan tampilan tertata rapi, kondisi jalan, jalur pedestrian, taman dan ruang publik, adalah adanya tampilan gedung yang berbentuk "Patung Sapi Ndekem" atau disebut Gedung Lembu Sora. Selain sebagai landmark kawasan, gedung ini juga berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk kunjungan pariwisata, pendidikan, maupun untuk kepentingan lainnya.

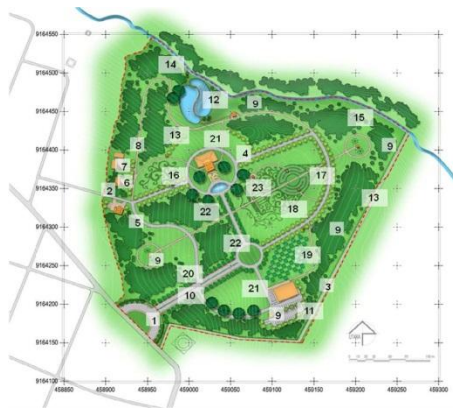


Gambar 1. Lembu Suro Convention Building

Kebun Raya Indrokilo Boyolali mulai direncanakan dan dibuat masterplannya pada tahun 2015. Kebun Raya Indrokilo menjadi representasi dari kawasan *ex situ* pada ekosistem dataran rendah Jawa bagian tengah dan timur yang akan mengkonversi tumbuhan asli dataran rendah Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah. Kebun Raya ini

Kelurahan Kemiri Boyolali sebagai Desa Wisata

akan semakin memperkuat upaya konservasi tumbuhan asli Jawa yang semakin terancam kepunahan seiring dengan hilangnya hutan alami. Kebun Raya Indrokilo hadir sebagai solusi untuk konservasi sumber daya hayati tumbuhan yang sekaligus menjadi media pembelajaran bagi masyarakat khususnya di Boyolali dan sekitarnya agar peduli dengan lingkungan. Dengan sentuhan nuansa budaya Jawa, Kebun Raya Indrokilo akan menjadi etalase budaya Jawa sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan akan menjadi daerah tujuan wisata untuk wisatawan dalam negeri maupun manca negara.



Gambar 2. Kebun Raya Indrokilo Masterplan



Gambar 3. Wilayah Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Sampai saat ini pengunjung atau wisatawan yang masuk wilayah Kelurahan Kemiri lebih banyak menuju ke kompleks perkantoran terpadu, terutama di bagian utara, karena lebih banyak obyek yang menarik untuk tempat santai, duduk dan jalan-jalan di sekitar alun-alun dan Masjid Agung.

Untuk lokasi Kebun Raya Indrokilo, karena belum selesai pengunjung relatif lebih sedikit. Profil pengunjung dapat digambarkan yaitu anak muda (laki-laki atau perempuan), dan berasal dari wilayah sekitar baik yang masih dalam lingkup Kabupaten Boyolali maupun di luar kabupaten.

Selain kunjungan ke dua objek utama yang relatif baru, di Sekitar Kebun Raya juga terdapat objek wisata yang bersifat religi, yaitu berupa : Pertapaan Reiki, Pertapaan Semar, Pertapaan Lamper Ireng dan Pemakaman Indrokilo. Beberapa objek tersebut masih sering dikunjungi pada waktu-waktu tertentu, terutama untuk obyek Pemakaman Indrokilo. Pengunjung kebanyakan berasal dari luar wilayah. Secara lebih jelas, identifikasi potensi wisata di Kelurahan Kemiri dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. Identifikasi Potensi Wisata

Obyek	Jenis Atraksi	Potensi				Keterangan
		1	2	3	4	
Komplek Perkantoran	<i>man made</i>	√	√	√	√	lokasi jauh dari perkim
KR Indrokilo	<i>man made</i>	√	√	√	√	lokasi dekat perkim
Pertapaan Reiki, Pertapaan Semar	<i>site / event culture</i>	√	√	√	√	lokasi dekat KRI
Pertapaan Lampes Ireng	<i>site / event culture</i>	√	√	√	√	lokasi terke- na projek KRI
Pemakaman Indrokilo	<i>site / event culture</i>	√	√	√	√	lokasi dekat KRI
Pemandangan alam	<i>site nature</i>	√	√	√	√	Sekitar KRI
Makanan khas	<i>site culture</i>	√	√	√	√	di bebe- rapa dukuh
Aktivitas sosial masy	<i>site culture</i>	√	√	√	√	di bebe- rapa dukuh

(Sumber : Survey 2017)

Pengembangan Potensi Desa Wisata

Pengembangan potensi desa wisata dilakukan berdasar identifikasi objek yang sudah dilakukan. Obyek yang akan dianalisis mencakup : komplek perkantoran terpadu, Kebun Raya

Indrokilo, Pertapaan Reiki, Pertapaan Semar, Pertapaan Lampes Ireng, Pemakaman Indrokilo, pemandangan alam, makanan khas, aktivitas sosial masyarakat. Analisis dan perumusan strategi pengembangan obyek secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.

Table 2. Tourist Village Development Analysis

No	Potency/ Form	Weaknesses	Opportunities	Development Strategies
1.	Komplek perkantoran terpadu	Keterlibatan masyarakat rendah sampai sedang, wilayah lebih eksklusif	Daya tarik cukup tinggi, sudah ramai dikunjungi orang	Sebagai daya tarik wisata untuk mendukung pengembangan desa wisata
2.	Man made/ Kebun Raya Indrokilo	Peran pemerintah sangat dominan, perlu upaya pihak ketiga untuk menjembatani kepentingan masyarakat	Daya tarik cukup tinggi, sudah ramai dikunjungi orang, potensi keterlibatan masyarakat tinggi	Prioritas pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung keberadaan KRI
3	Pertapaan Reiki, Pertapaan Semar	Keterlibatan masyarakat sedang	Dikenal masyarakat dari luar daerah	Pengembangan wisata religi dengan penambahan sarana prasarana
4	Pertapaan Lampes Ireng	Keterlibatan masyarakat sedang, lokasi terkena pembangunan KRI	Dikenal masyarakat dari luar daerah	Mengalihkan pengunjung ke obyek lain sejenis
5	Pemakaman Indrokilo	Keterlibatan masyarakat sedang	Dikenal masyarakat dari luar daerah	Pengembangan wisata religi dengan penambahan sarana prasarana
6	Pemandangan alam	Belum banyak dimanfaatkan, sarana prasana belum mendukung	Potensi dikembangkan masyarakat untuk pendukung KRI	Pengembangan wisata alam dengan penambahan sarana prasarana
7	Makanan khas	Belum dimanfaatkan	Potensi permintaan tinggi dan harga dapat lebih murah	Pengembangan sarana prasarana khususnya berkaitan dengan makanan
8	Aktivitas sosial masyarakat	Belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan wisata	Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan/ pariwisata	Pengembangan sarana prasarana khususnya berkaitan akomodasi

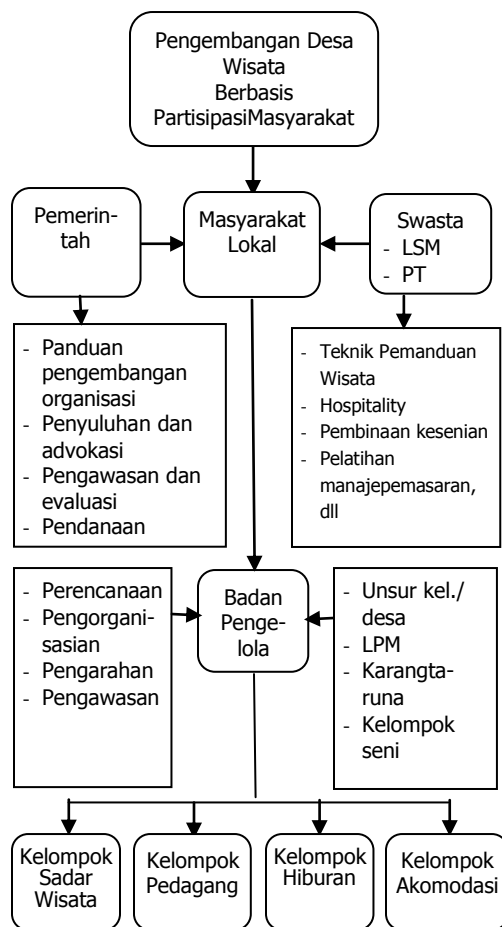
Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Berdasar pendataan lapangan masyarakat mempunyai keinginan untuk : (1) terlibat penuh dalam pengembangan wilayah (pembangunan yang ada di wilayahnya) ;(2) menghargai hak-hak masyarakat lokal; (3) memperhatikan

keseimbangan dan daya dukung alam; (4) memperhatikan tradisi/ simpul budaya yang ada; (5) ada kelembagaan otonom dan mandiri yang dibentuk masyarakat lokal untuk mendukung/

pengelolaan obyek wisata.

Berdasar analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa, masyarakat mempunyai motivasi untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan, namun mereka belum banyak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola desa wisata, baik secara individu maupun dalam kelompok. Mereka cukup sadar akan peluang berusaha, namun belum siap secara rinci mengenai rencana kegiatan usahanya. Peran pemerintah daerah pada awal kegiatan yang masih dominan perlu untuk dibarengi peran masyarakat dan pihak lain, seperti yang diusulkan oleh Dewi (2013).



Gambar 4. Model Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (Diolah dari Dewi, 2013)

Kesimpulan

Kelurahan Kemiri dapat dijadikan sebagai Desa Wisata berdasarkan potensi yang dimiliki dan didukung oleh adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Perlu peran dari berbagai pihak untuk usaha pengembangan desa wisata, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga (swasta, PT, LSM). Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan rincian kegiatan dari masing-masing *stake holder* pembangunan Desa Wisata Kemiri.

Daftar Pustaka

Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.

Adiyoso, W. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: ITS Press.

Dewi, M. H. U. dkk. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara*, 3,2, 129-139.

Muslim, A. (2016). Economic Community Empowerment Through Tourist Village Development. *Mimbar*, 32, 2, 343-352.

Nasikun (1997). Model Pariwisata Pedesaan : Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan. dalam *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.

Susyanti, D. W. (2013). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12, 1, 33-36.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.